

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan oleh pemerintah pusat dalam mengurus sendiri urusan pemerintahannya hal ini dikarenakan pada tahun 1999 melalui UU No 22 tentang pemerintah daerah telah diterapkan sistem otonomi daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik yang dampaknya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sistem otonomi daerah ini mengharuskan tiap daerah untuk menggali dan memaksimalkan semua potensi yang ada di daerah dan dimanfaatkan sebaik mungkin, agar melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dan tidak lagi bergantung dana dari pemerintah pusat, otonomi daerah membuat masing-masing daerah berhak mengatur ketentuan perpajakannya sendiri lewat Peraturan Daerah (Perda), namun tetap harus mengacu pada Undang-Undang, Pemerintah daerah harus berusaha membuat Perda tentang Pajak Daerah menjadi pedoman agar penerimaan daerah didapat dengan maksimal, (Kantale, Herman Karamoy, dan Jessy D.L Warongan 2016).

Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang penting dalam meningkatkan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (Karina & Novi Budiarmo, 2016).

Untuk belanja daerah dan pembangunan daerah itu sendiri, Pemerintah daerah (PEMDA) mempunyai kewenangan atas pendapatan asli daerah (PAD). PAD itu sendiri bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah, yang memiliki peranan sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah yaitu berasal dari pajak daerah.

Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor termasuk dalam jenis Pajak Provinsi yang hasilnya akan diberikan kepada Kabupaten/Kota dengan sistem bagi hasil. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberikan peran dan nilai cukup tinggi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, hal ini disebabkan hampir semua masyarakat membutuhkan dan mempunyai kendaraan bermotor termasuk pada Provinsi Gorontalo, Provinsi yang menjadi salah satu jalur perdagangan, dimana transportasi adalah modal utama dalam perhubungan untuk segala kegiatan ekonomi.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo yang saat ini semakin berkembang pesat, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1**  
**Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan Di**  
**Provinsi Gorontalo Tahun 2008-2016**

Tahun	Jenis					Total
	Mobil Penumpang	Bus	Mobil Barang	Sedepad Motor	Mobil Khusus	
2008	3.911	225	3.161	39.467	51	<b>46.815</b>
2009	4.618	228	3.382	46.420	52	<b>54.700</b>
2010	5.517	248	3.683	53.549	52	<b>63.049</b>
2011	12.431	714	10.692	196.302	155	<b>220.294</b>
2012	13.971	704	12.328	215.990	153	<b>243.146</b>
2013	16.002	712	13.902	235.068	180	<b>265.864</b>
2014	18.180	723	15.886	257.627	190	<b>292.606</b>
2015	20.377	737	17.267	276.294	213	<b>314.888</b>
2016	22.989	742	18.453	298.575	232	<b>340.991</b>
<b>Rata-Rata</b>						<b>204.706</b>

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya jumlah kendaraan bermotor di provinsi gorontalo semakin meningkat, tercatat dalam kurun waktu 2008-2016 peningkatan jumlah kendaraan bermotor rata-rata naik sebesar 204.706. Hal ini akan menyebabkan peningkatan sumber penerimaan daerah khususnya dari sektor PKB, jika dikelola dengan efektif dan efisien maka pajak kendaraan bermotor akan mempunyai prospek yang cukup bagus bagi penerimaan daerah. Alasan peneliti ini adalah fokus pada PKB dan BBNKB, karena semakin meningkatnya populasi kendaraan bermotor dan jual beli kendaraan bekas di provinsi Gorontalo yang akan berdampak bagi penerimaan pajak dan pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo.

Dibawah ini merupakan presentase (%) capaian target dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo.

**Tabel 2**  
**Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Gorontalo Tahun 2008-2017**

Tahun	Pajak Kendaraan Bermotor		Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2008	22.778.096.000,00	23.788.620.300,00	28.627.906.200,00	35.837.364.400,00
2009	29.112.732.800,00	29.357.472.100,00	36.446.424.000,00	29.621.754.069,00
2010	32.575.861.400,00	37.695.619.718,00	41.556.852.923,00	58.927.751.550,00
2011	42.178.606.599,00	46.234.705.090,00	66.552.687.034,00	71.352.299.350,00
2012	49.629.243.299,00	54.644.527.740,00	71.125.005.998,00	80.503.385.100,00
2013	60.289.473.017,42	64.532.666.168,00	86.526.829.602,00	94.489.907.485,00
2014	71.541.578.160,55	68.866.801.675,00	96.801.658.930,30	92.579.288.800,00
2015	84.150.795.229,68	71.359.083.357,00	113.234.880.132,14	77.891.788.800,00
2016	84.236.134.426,67	79.029.377.668,00	113.663.266.480,98	85.409.833.050,00
2017	85.346.872.026,00	87.005.823.987,00	113.663.266.480,00	88.667.262.530,00

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah, Bidang Pendapatan

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa pajak kendaraan bermotor dari tahun 2008- 2013 realisasinya mencapai target bahkan lebih dari target yang ditetapkan, sedangkan untuk tahun 2014-2016 realisasinya tidak mencapai target, kemudian ditahun 2017 realisanya kembali mencapai target bahkan realisasinya melebihi target yang ditetapkan, sedangkan untuk bea balik nama kendaraan bermotor mengalami fluktuasi dari tahun 2008-2013 realisasinya selalu mencapai terget bahkan lebih dari target yang ditetapkan, sedangkan untuk 2014-2017 realisanya justru tidak mencapai target yang dtetapkan, hal ini menunjukkan bahwa

potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo belum optimal.

Hasil penelitian sari (2013) menunjukkan bahwa Kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD di provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun 2009-2012. Kontribusi PKB yaitu berkisar antara 33,9% - 35,9% dengan rata-rata 34,8%, sedangkan Kontribusi BBNKB berkisar antara 30,6% - 42,7% dengan rata-rata sebesar 36,6%. Sedangkan hasil penelitian Rosalina (2008) menunjukkan bahwa Terjadi penurunan presentasi atas kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD dari tahun ketahun, penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 4,36% dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor terjadi penurunan presentase atas kontribusi terhadap PAD sebesar 8,71% pada tahun 2005, sedangkan pada tahun 2006 dan 2007 mengalami peningkatan.

Belum ada penelitian lebih lanjut yang meneliti tentang Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo periode 2008-2017, sehingga belum terkonfirmasi seberapa besar Kontribusi yang diberikan oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo Periode 2008-2017 dan bagaimana Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Gorontalo periode 2008-2017.

Penelitian ini merupakan rujukan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Karina & Novi (2016) yang meneliti mengenai Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2012-2014. Hasil penelitiannya menemukan bahwa Kontribusi pajak atas kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo adalah sedang, dengan rata-rata persentase yang diperoleh sebesar 29,64%. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada variabel penelitian dan waktu penelitian, penelitian sebelumnya hanya menggunakan satu variabel penelitian yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan waktu penelitiannya adalah tahun 2012-2014, sedangkan penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan waktu penelitiannya yaitu dari tahun 2008-2017.

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo memberikan kontribusi yang cukup besar dalam meningkatkan PAD yang dilihat dari jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat, kemudian masih rendahnya kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah yang dilihat dari realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang belum mencapai target yang ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh pajak

kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo dan tingkat efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo dengan judul “**Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo Periode 2008 – 2017**”.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi yakni:

1. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terjadi tiap tahunnya di Provinsi Gorontalo.
2. Masih rendahnya capaian realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari target yg ditetapkan.

### **1.3. Rumusan Masalah**

1. Seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Gorontalo Tahun 2008-2017?
2. Apakah pemungutan pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 sudah efektif?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kontribusi yang diberikan oleh Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo Tahun 2008-2017.
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Gorontalo tahun 2008 sampai dengan tahun 2017.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya adalah sebagai berikut:

##### **1.5.1. Manfaat teoritis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya bidang akuntansi sektor publik.
2. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

##### **1.5.2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengevaluasi kinerja dan lebih mengoptimalkan kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo. Selain itu dapat pula dijadikan sebagai masukan

dalam usaha peningkatan pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.